BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian dunia yang didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin maju telah membawa masyarakat ke arah masyarakat informasi, dimana kebutuhan akan peralatan telekomunikasi yang canggih semakin meningkat. Keadaan ini telah memacu para pelaku bisnis dan ekonomi harus dapat melakukan berbagai perubahan kegiatan ekonominya menjadi seefektif dan seefisien mungkin (Arie Darmanto, 2004: 39).

Pengaruh globalisasi juga memicu para pelaku bisnis dan ekonomi untuk melakukan berbagai tindakan agar bisnisnya tetap dapat bertahan didunia bisnis agar tujuannya dapat tercapat maka kegiatan usahanya harus efektif dan efisien. Dalam perekonomian modern, manajemen dan pemilik perusahaan semakin nyata dipisahkan untuk kepentingan pengendalian. Pemisahan ini dapat menimbulkan adanya transparasi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan yang tetap antara kepentingan-kepentingan yang ada misalnya antara pemegang saham dan manajemen (Arie Darmanto, 2004: 42)..

Keadaan ekonomi Indonesia yang belum stabil membuat perusahaan semakin banyak bergantung pada modal eksternal untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan perusahaan. Agar memperoleh dana jangka panjang yang stabil, sistem perusahaan harus

diakui secara internasional. Peraturan-peraturan dibuat untuk memberikan arahan dalam pengelolaan dan pengendalian perusahaan yang akan menjadikan perusahaan lebih dipercaya dan diandalkan, baik di dalam negeri maupun dunia internasional (Hermawan Efeendi, 2002: 87).

Dalam hal ini pemerintah memiliki peranan yang penting untuk itu pemerintah memberlakukan peraturan yang memadai. Namun manajemen perusahaan memegang peran yang paling dominan dalam jalannya sebuah usaha untuk itu manajemen memegang tanggung jawab utama untuk melaksanakan sistem *Corporate Governance* yang baik di dalam perusahaan. Perusahaan harus semakin waspada terhadap pengawasan masyarakat semakin tajam terhadap tindakan pimpinan perusahaan (Hermawan Efeendi, 2002: 90).

Manusia merupakan pilar utama dalam membawa organisasi ke arah yang lebih baik atau bahkan sebaliknya. Setiap organisasi membutuhkan suatu pengendalian internal yang baik agar tujuan organisasi dan kepentingan-kepentingan *stakeholders* dapat tercapai optimal. Demi kepentingan mereka maka perusahaan perlu memastikan kepada pihak penyandang dana eksternal bahwa dana-dana tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin dan memastikan bahwa manajemen melakukan yang terbaik untuk kepentingan perusahaan tanpa adanya benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi (Arief Effendi, 2006: 2).

Menurut laporan *Coruption and Fraud in Internasional Aid and Business Projects* (W. Michael Kramer, IIA *Internasional Conference*, Washington DC, Juni

2003) mengemukakan 10 negara terkorup dan Indonesia menduduki urutan ke empat sebagai *Most Corrupt Countries*. Selain itu menurut riset yang dilakukan oleh *McKinsey and Company* tentang praktik *Good Corporate Governance* di tujuh Negara Asia (Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Thailand dan Indonesia) menetapkan Indonesia di posisi terbawah.

Hasil-hasil survey memberikan pertanda bahwa sudah saatnya organisasi dan perusahaan-perusahaan di Indonesia didorong untuk segera memperbaiki kualitas penerapan *Good Corporate Governance.* Dan kini telah terbentuk lembaga-lembaga yang mendorong penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia seperti *The Institute for Good Corporate Governance(IICG).*

Good Corporate Governance (GCG) sering diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Namun pada umumnya telah disepakati bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Keputusan Menteri BUMN No 117/M/MBU/2002, tanggal 1 Agustus 2002) telah mencangkup transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Setiap pedoman *Corporate Governance* tidak dimaksudkan untuk diterapkan pada setiap organisasi atau perusahaan hal ini dimaksudkan karena kebutuhan setiap perusahaan berbeda-beda dan setiap akan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Setiap perusahaan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip yang ada untuk mengembangkan praktik-praktik *Corporate Governance* yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing.

Akuntan memiliki peranan yang penting terhadap *Good Corporate Governance.* Salah satu aplikasi profesi akuntan dalam perusahaan adalah sebagai auditor internal, yang memiliki fungsi sebagai compliance auditor dan internal business consultant bagi perusahaan dituntut antara lain mampu memberikan nilai tambah untuk organisasinya dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance* (*Commite on Auditing Procedures, Statement on Auditing Statement Net*, AICPA, New York, 1973: 5).

Profesi audit internal mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu, keberadaannya untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan sebagai fungsi yang independen dengan menciptakan sikap professional dalam setiap aktivitasnya mendorong pihak terkait untuk terus melakukan pengkajian terhadap profesi ini (S.Hadibroto *et all*, 2002: 6).

Salah satu fungsi audit internal yaitu menyediakan informasi mengenai kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian manajemen dan kualitas kinerja perusahaan bagi manajemen. Beberapa masalah kemudian timbul berkaitan dengan audit internal, seberapa efektif keberadaan audit internal dalam memberikan nilai tambah bagi perusahaan (Ruchyat Kosasih, 2005: 297).

Sistem pengendalian intern semakin menjadi tumpuan dalam mewujudkan organisasi yang sehat dan berhasil. Kewajiban untuk mengembangkan, menjaga, dan melaporkan sistem pengendalian intern merupakan ketentuan bagi instansi pemerintah dan BUMN/BUMD, Bank, Perusahaan Publik, Maupun lembaga bantuan dari pemerintah.

Pemerintah melalui kementrian Negara BUMN mulai memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* ini di lingkungan BUMN, sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kinerja BUMN yang memiliki nilai asset yang demikian besar untuk mendukung pencapaian penerimaan/pendapatan Negara, sekaligus menghapuskan berbagai bentuk praktek inefisiensi, korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyimpangan lainnya untuk memperkuat daya saing BUMN menghadapi pasar global. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan misi dan peran yang dimilikinya saat ini menghadapi tantangan kompetensi global dunia usaha yang semakin besar. BUMN diharapkan menaikkan efisiensi sehingga menjadi unit usaha yang sehat dan memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan interaksinya dengan aspek-aspek kehidupan nasional. BUMN harus peka terhadap setiap perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, dan dunia usaha. Sehingga profesionalisme BUMN di segala bidang terus meningkat baik dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan maupun dalam bidang pengendalian dan pengawasan (Holmes *et all,* 1999: 109-111).

Dikutip dari harian *MinergyNews (Posted by*: David Dwiarto / Thursday*, October 9, 2003*), Hasil audit, ujar Arie, tidak menemukan adanya sebuah BUMN pun yang masuk dalam klasifikasi sangat baik. Dari audit ini, enam BUMN dinilai berkinerja baik, yaitu BNI Tbk, PT. Asuransi Ekspor Indonesia, PT Pelindo II, PT Krakatau Steel, PT Perkebunan Nusantara, dan PT Surveyor Indonesia. Menurut kepala BPKP Arie Soelandro, audit dilakukan BPKP terhadap 16 BUMN selama kurun waktu Oktober 2004 hingga Mei 2005. Dari pelaksanaan audit, kata Arie, dapat disimpulkan bahwa komitmen BUMN untuk menerapkan *Good Corporate Governance* masih rendah.

“Komitmen menerapkan GCG ternyata masih dipersepsikan sebagai hal yang masih bersifat mandatory” katanya saat menyerahkan hasil audit tersebut kepada Menneg BUMN Laksamana Sukardi. Dalam kesempatan tersebut Menneg BUMN Laksamana Sukardi mengatakan, audit ini merupakan langkah preventif untuk segera memperbaiki kinerja BUMN. Pengalaman membuktikan, sambungnya, bahwa pengabaian terhadap GCG bukan hanya memperburuk kinerja perusahaan, namun juga perekonomian nasional. Karena antara GCG dengan kinerja keuangan memiliki korelasi yang erat.

Menyinggung tentang seminar nasional GCG, menurut Sugiharto (2002: 150), untuk mendorong agar BUMN dan non-BUMN, termasuk instansi pemerintah, untuk tidak ragu mengimplementasikan GCG. “Perception Index mengenai pelaksanaan tata kelola BUMN, khususnya perusahaan-perusahaan di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan Negara-negara lain di Asia”. Sugiharto yang menjadi pembicara kunci dengan paparan “Peran Direksi dan Komisaris dalam mengefektifkan Implementasi GCG yang berkesinambungan”, mengatakan jika implementasi GCG di lingkungan BUMN dapat dipercepat, “wajah” Indonesia akan menjadi lebih baik. “Dengan memiliki SDM yang berakhlak mulia, tentulah GCG dapat diimplementasikan dengan baik. Hal itu menjadikan kinerja perusahaan dapat membaik dan meningkatkan kepercayaan investor. Perusahaan dapat tumbuh baik sehingga *corporate value* akan selalu membaik”, katanya.

Bank X (Persero), berkomitmen untuk menerapkan praktik-praktik GCG dalam pengelolaan perusahaan sehari-hari. Komitmen tersebut diwujudkan antara lain dengan

membuat infra struktur GCG yang melandasi penerapan GCG di lingkungan perusahaan, diantaranya adalah dengan penyusunan Pedoman *Corporate Governance* (*Code of Corporate Governance*). Pedoman ini menjadi acuan bagi organ perusahaan dalam menerapkan praktik-praktik *Good Corporate Governance* di lingkungan perusahaan. Keberhasilan implementasi pedoman *Corporate Governance* ini sangat bergantung pada komitmen dari pimpinan tertinggi perusahaan dalam menegakan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dengan didukung oleh seluruh jajaran perusahaan.

Beberapa ide penelitian terdahulu yang menguji "Pengaruh Kualitas Audit Internal terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank X" telah dilakukan diantaranya dilakukan oleh :

- R. Cherrya Angelia Kathlia (2006) dengan judul Fungsi Auditor Internal dalam Meningkatkan *Good Corporate Governance* (Studi kasus pada PT Pos Indonesia) dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan menyimpulkan bahwa pelaksanaan audit internal pada PT Pos Indonesia sudah memadai pelaksanaan GCG pada PT Pos Indonesia juga telah terlaksana dengan baik.
- Angga Nugraha Sunjaya (2007) dengan judul Fungsi Auditor Internal dalam Meningkatkan *Good Corporate Governance* (Studi kasus pada PT Perkebunan Nusantara VIII) dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan menyimpulkan bahwa pelaksanaan audit internal pada PT Perkebunan Nusantara

VIII sudah memadai pelaksanaan GCG pada PT Perkebunan Nusantara VIII juga telah terlaksana dengan baik.

- Resda Nella (2007) dengan judul Pengaruh Persepsi Auditor Internal tentang Peran Auditor Internal dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (Studi Kasus pada PT Pupuk Kijang) dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan menyimpulkan bahwa adanya pengaruh peran auditor dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* pada PT Pupuk Kijang, dan pelaksanaan GCG pada PT Pupuk Kijang juga telah terlaksana dengan baik.
- Ari Adistia Racmad (2008) dengan judul Pengaruh Persepsi Auditor Internal dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (Studi Kasus pada PT Telekomunikasi Indonesia) dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan menyimpulkan bahwa adanya pengaruh auditor internal yang kuat dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* pada PT Telekomunikasi Indonesia, dan pelaksanaan GCG pada PT Telekomunikasi Indonesia juga telah terlaksana dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian kepada para auditor internal pada Bank X dan penelitian ini akan dijelaskan dalam skripsi yang berjudul :

"Pengaruh Peranan Audit Internal terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank X"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah peranan audit internal berpengaruh terhadap pelaksanaan GCG pada Bank X ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menguji secara empiris seberapa besar pengaruh peranan audit internal terhadap pelaksanaan GCG pada Bank X.

1.4 Kegunaan penelitian

Setelah melakukan penelitian, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

1. **Bagi penuliis,** penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi akuntansi di Universitas Kristen Maranatha dan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan.
2. **Bagi Bank X,** penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk ditetapkan sebagai kebijakan dalam melaksanakan Good Corporate Governance pada Bank

X agar tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia tentang prinsip-prinsip GCG.

3. **Bagi civitas akademika,** penelitian ini dapat diharapkan menambah wawasan mengenai audit internal pada dunia perbankan.